

# **LAPORAN KINERJA 2019**

**BAGIAN KEUANGAN**

**BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM**

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Bagian Keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Bagian Keuangan sebagai bagian dari Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bagian Keuangan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bagian Keuangan di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 24 Januari 2020  
Kepala Bagian Keuangan,

Ajat Sudrajat

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Bagian Keuangan.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bagian Keuangan tahun 2019 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan	4 laporan	100%
	2. Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 1</b>			<b>100%</b>
2. Terselenggaranya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	3. Jumlah Laporan Keuangan BSN Semester, Unaudited dan Audited	1 dokumen	1 dokumen	100%
	4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	5. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran BSN	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 2</b>			<b>100%</b>
3. Terselenggaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat dan akuntabel	6. Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	3 dokumen	3 dokumen	100%
	7. Jumlah draft Perka BSN terkait revisi PP PNBP BSN	5 dokumen	5 dokumen	100%
	8. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 kali	1 kali	100%
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>			<b>100%</b>
<b>Rata-rata capaian Tahun 2019</b>				<b>100%</b>

Dari 8 indikator kinerja di Bagian Keuangan, target indikator kinerja yang teralisasi adalah 100%.

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	1
<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	3
<b>Daftar Isi</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	5
I.2 Maksud dan Tujuan .....	5
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
I.4 Sumber Daya Manusia .....	7
I.5 Peran Strategis .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.1 Perencanaan Strategis .....	9
II.1.1 Visi dan Misi .....	9
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	9
II.2 Perjanjian Kinerja .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Capaian Kinerja .....	13
III.2 Realisasi Anggaran .....	20
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	21
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

## I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Keuangan – Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bagian Keuangan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum tahun 2019.

## I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

### I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Bagian Keuangan – Biro PKU adalah melaksanakan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Keuangan – Biro PKU menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan perbendaharaan, pemantauan serta evaluasi administrasi dan pengelolaan keuangan,
2. pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan dan menyiapkan bahan akuntansi pelaporan keuangan,
3. pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan negara bukan pajak.

Struktur Bagian Keuangan – Biro PKU dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Bagian Keuangan – Biro PKU**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Keuangan – Biro PKU mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subbagian Perbendaharaan, dengan tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan, pemantauan serta evaluasi administrasi dan pengelolaan keuangan
2. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi, dengan tugas melakukan verifikasi dokumen keuangan dan menyiapkan bahan akuntansi pelaporan keuangan
3. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan tugas melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan penerimaan negara bukan pajak.

#### I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Bagian Keuangan – Biro PKU memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 (delapan belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Bagian Keuangan – Biro PKU**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Bagian Keuangan	-	1	-	1
2.	Subbagian Perbendaharaan	6	3	-	9
3.	Subbagian Verifikasi dan Akuntansi	2	3	-	5
4.	Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak	1	2	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>18</b>

#### I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bagian Keuangan – Biro PKU mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu menjalankan peran pengelolaan keuangan. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Keuangan – Biro PKU telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan

tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2**  
**Potensi dan Permasalahan Bagian Keuangan – Biro PKU**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan keuangan tersentralisasi di Bagian Keuangan dengan sistem pengelolaan yang sesuai peraturan perundangan dan BSN hanya memiliki 1 (satu) satuan Kerja</li> <li>2. Terdapat beberapa aplikasi keuangan yang mempermudah pengelolaan keuangan, termasuk Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (SIPAKAR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak semua pejabat struktural yang memahami proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga pengawasan dan pengendalian masih kurang efektif</li> <li>2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan, khususnya di unit kerja teknis</li> <li>3. Belum terintegrasinya aplikasi keuangan yang ada, sehingga belum optimal pemanfaatannya (SAS dan SIPAKAR masih terpisah)</li> <li>4. Adanya beberapa staf yang purnabakti dan mutasi ke unit lain tanpa adanya staf pengganti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya peningkatan pemahaman pejabat struktural melalui sosialisasi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan secara periodik</li> <li>2. Melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan kepada para pegawai yang ditugaskan dari unit kerja teknis, khususnya yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan</li> <li>3. Melakukan integrasi aplikasi keuangan yang ada dengan bantuan pengembang aplikasi yang kompeten</li> <li>4. Memberikan rangkap pekerjaan kepada beberapa staf bagian keuangan untuk mengatasi keterbatasan personil.</li> </ol>



## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

### II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

#### **VISI**

**“Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel”**

#### **MISI**

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah sebagai berikut:

## TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga;
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

## SASARAN

1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional
2. Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel
4. Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

### II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum sehingga indikator kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum**  
**Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
<b>Customer Perspectives</b>		
1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang professional	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB) Nilai
	2. Opini BPK atas laporan keuangan BSN	WTP Opini
	3. Indeks kepuasan layanan internal biro PKU	3,5 Nilai
<b>Internal Process Perspectives</b>		
2. Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel	4. Persentase penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat waktu	100 %
	5. Persentase penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu	70 %
	6. Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti	70 %
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	7. Persentase kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100 %
	8. Persentase penyampaian laporan PNBPN tepat waktu	100 %
4. Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis	9. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN	100 %
<b>Learning and Growth Perspectives</b>		
5. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	10. Persentase realisasi anggaran Biro PKU	≥ 97 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bagian Keuangan Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.2**  
**Perjanjian Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan
		2. Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman	1 dokumen
2.	Terselenggaranya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	3. Jumlah Laporan Keuangan BSN Semester, Unaudited dan Audited	1 dokumen
		4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan	4 dokumen
		5. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran BSN	1 dokumen
3.	Terselenggaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat dan akuntabel	6. Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	3 dokumen
		7. Jumlah draft Perka BSN terkait revisi PP PNBP BSN	5 dokumen
		8. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 kali

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BSN**, melalui kegiatan:

**3550 Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum**, yang akan menghasilkan output dan komponen yang terkait dengan Bagian Keuangan, yaitu:

Output : **3550.955 Layanan Keuangan**

Komponen : 051. Penyusunan Laporan Keuangan

052. Pengelolaan Perbendaharaan

053. Tatalaksana Keuangan

054. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bagian Keuangan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian Keuangan yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1**  
**Pencapaian Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
1. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan	4 laporan	100%
	2. Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman	1 dokumen	1 dokumen	100%
2. Terselenggaranya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	3. Jumlah Laporan Keuangan BSN Semester, Unaudited dan Audited	1 dokumen	1 dokumen	100%
	4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	5. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran BSN	1 dokumen	1 dokumen	100%
3. Terselenggaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat dan akuntabel	6. Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	3 dokumen	3 dokumen	100%
	7. Jumlah draft Perka BSN terkait revisi PP PNBP BSN	5 dokumen	5 dokumen	100%
	8. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 kali	1 kali	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian Keuangan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN  
1**

**Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel**

**Tabel III.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	Laporan	-	-	-	-	4	4	100%	4	100%

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
2. Jumlah draft dokumen review peraturan/ pedoman	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100%	1	100%
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>								<b>100%</b>		

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terselenggaranya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

### 1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan.

Kordinasi Pelaksanaan anggaran dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh komponen pengelola anggaran dalam hal pertanggungjawaban. Telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi pengelola anggaran dilingkungan BSN dengan mereshfresh aturan-aturan tentang pengelolaan anggaran. Evaluasi pelaksanaan Anggaran dilakukan pada awal semester II, di Hotel Grand Savero Bogor pada tanggal 1-2 Juli 2019 dengan mengundang seluruh Pengelola Anggaran 2019. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan anggaran yang ada di setiap unit kerja. Dalam acara ini para pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan paparan tentang realisasi kegiatan, proses pertanggungjawaban, kendala yang dihadapi dan tindaklanjut perbaikan yang akan dilakukan. Dalam acara evaluasi ini juga disampaikan tentang penggunaan kartu kredit pemerintah dan strategi penggunaan Uang Persediaan dalam rangka pembatasan penggunaan Uang Persediaan tunai sebesar 60% karena adanya penggunaan Uang Persediaan sebesar 40% untuk Kartu Kredit Pemerintah.



## 2. Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman

Bagian Keuangan dituntut untuk selalu mengikuti perubahan peraturan yang terkait dengan pengelolaan anggaran. Untuk itu, Bagian Keuangan telah melakukan review peraturan agar para pengelola anggaran di BSN mengikuti peraturan yang terbaru. Salah satu peraturan yang di review adalah PMK No 178/PMK.05/2018 perubahan atas PMK 190/PMK.0/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara.



### SASARAN 2

**Terselenggaranya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**

**Tabel III.3  
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
3. Jumlah laporan keuangan BSN semester, unaudited dan audited	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100 %	1	100%
4. Jumlah laporan keuangan bulanan dan triwulan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	100%	4	100%
5. Jumlah laporan realisasi anggaran BSN	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>								<b>100%</b>		

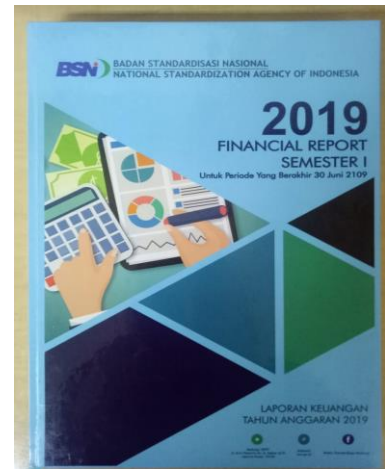
\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terselenggaranya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.



### 3. Jumlah laporan keuangan BSN semester, unaudited dan audited.

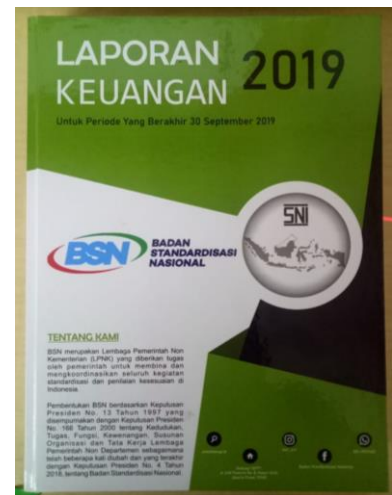
Indikator kinerja yang dipakai untuk mengukur bagian ini adalah jumlah laporan keuangan yang dibuat oleh BSN selama tahun 2019. Sesuai dengan target di tahun 2019, Bagian Keuangan telah membuat 1 dokumen yang terdiri dari 3 laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Keuangan Semester, Laporan Keuangan Unaudited, dan Laporan Keuangan Audited. Laporan tersebut sudah diaudit oleh BPK dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



### 4. Jumlah laporan keuangan bulanan dan triwulan

Laporan keuangan bulanan dan triwulan merupakan laporan rutin yang dibuat Bagian Keuangan setiap bulannya, yang menjadi tahapan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan unaudited dan audited.

Laporan keuangan bulanan dan triwulan dilakukan oleh Bagian Keuangan dengan berkoordinasi dengan pihak KPPN Jakarta IV terkait dengan rekonsiliasi Pagu Belanja, Pengembalian Belanja, Estimasi PNBPN, jumlah PNBPN, serta pengembalian PNBPN dalam setiap periode yang berkaitan.



### 5. Jumlah laporan realisasi anggaran BSN

Bagian Keuangan juga membuat laporan realisasi anggaran yang dipakai untuk mengetahui dan memantau serapan anggaran yang sudah teralisasi tiap bulannya. Laporan ini dibuat sebanyak 1 dokumen yang terdiri dari 12 laporan. Dengan adanya laporan realisasi ini, diharapkan penyerapan anggaran tiap pusat/bagian dapat dengan mudah diketahui dan dilakukan tindak lanjut yang dibutuhkan dengan segera.

**SASARAN  
3****Terselenggaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat dan akuntabel****Tabel III.4  
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
6. Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	Dokumen					3	3	100%	3	100%
7. Jumlah draft Perka BSN terkait revisi PP PNBP BSN	Dokumen					5	5	100%	5	100%
8. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	Kali					1	1	100%	1	100%
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>								<b>100%</b>		

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terselenggaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

**6. Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN**

Berdasarkan surat edaran dari Kemnenterian Keuangan Nomor No. S-1/MK.2/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN TA 2020. Bagian Keuangan telah mengirimkan Surat permintaan target PNBP serta Pagu pengeluaran PNBP kepada Setiap Unit Layanan PNBP. Setelah data yang diberikan Unit layanan lengkap bagian keuangan menyusun draft Proposal yang akan diajukan terkait target dan pagu Indikatif PNBP TA 2020 kepada Direktorat Jenderal Anggaran serta melakukan input data kedalam aplikasi TRPNBP yang nanti ADK nya dilampirkan dalam pengajuan proposal. Setelah Proposal dikirimkan ke DJA, kemudian dilakukan penelaahan terhadap target tersebut dan dibuatkan Berita Acara Koordinasi Rencana PNBP.

## 7. Jumlah draft Perka BSN terkait revisi PP PNBP BSN

Dalam rangka perbaikan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap prosedur pengelolaan PNBP, telah dilakukan revisi keputusan kepala BSN nomor 3/KEP/BSN/I/2019 menjadi Keputusan Kepala BSN nomor 461/KEP/BSN/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019. Perubahan ini telah dibahas dengan tiap unit layanan PNBP dilingkungan BSN. Diharapkan dengan terbitnya Keputusan ini, pelayanan PNBP akan semakin baik dari segi administrasi maupun teknis.

## 8. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN

Dalam rangka memperingati Hari Standar Dunia (World Standard Day) pada bulan Oktober, Badan Standardisasi Nasional menyelenggarakan acara puncak Bulan Mutu Nasional 2019 di Semarang, Jawa Tengah, salah satu kegiatan dalam acara Bulan Mutu Nasional tersebut adalah "Forum Sekretaris Utama LPNK Ristekdikti". Dalam kesempatan ini Badan Standardisasi Nasional mengundang para Sekretaris Utama untuk menghadiri Forum Sekretaris Utama LPNK Ristek Dikti. Di forum ini salah satu materi yang disampaikan adalah tentang rancangan revisi PP PNBP yang berlaku di BSN yang pada saat ini sudah ditetapkan dengan PP No.74 tahun 2019 merupakan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional terkait jenis dan tarif layanan jasa kalibrasi dan pengukuran.



### III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Bagian Keuangan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.584.377 atau 99,98%.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Keuangan TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.5**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Bagian Keuangan TA. 2019**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
051	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan	369.917.000	369.843.760	99,98%
052	Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan	1.319.724.000	1.319.548.310	99,99%
053	Melaksanakan Tata Laksana Keuangan	10.225.000	10.225.000	100%
054	Melaksanakan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	300.134.000	299.967.307	99,94%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.999.584.377</b>	<b>99,98%</b>

Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Keuangan Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Keuangan Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

## LAMPIRAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 Bagian Keuangan Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajat Sudrajat  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Beni Nugraha  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. Beni Nugraha

Jakarta, 30 April 2019  
Pihak Pertama

Ajat Sudrajat



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BAGIAN KEUANGAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	1 Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 Laporan
	2 Jumlah draft dokumen review peraturan/ pedoman	1 Dokumen
2 Terselenggaranya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	3 Jumlah Laporan Keuangan BSN semester, Unaudited dan Audited	1 Dokumen
	4 Jumlah Laporan keuangan Bulanan dan Triwulan	4 Dokumen
	5 Jumlah Laporan Realisasi Anggaran BSN	1 Dokumen
3 Terselenggaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat dan akuntabel	6 Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	3 Dokumen
	7 Jumlah draft Perka BSN terkait revisi PP PNBP BSN	5 Dokumen
	8 Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 Kali

Pihak Kedua

M. Beni Nugraha

Jakarta, 30 April 2019  
Pihak Pertama

Ajat Sudrajat